



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI ASIH LINTARTI
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 202726

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 646 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000
2. Tanah Seluas 767 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. Tanah Seluas 207 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
4. Tanah Seluas 1.050 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. Tanah Seluas 326 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
6. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
7. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
8. Tanah Seluas 696 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 131.300.000

1. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.800.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
4. MOTOR, HONDA E1F02N11M2A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. MOTOR, HONDA K1H02N14LOA/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
6. MOTOR, HONDA ACB2J21B02 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	734.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	106.759.419
F. HARTA LAINNYA	Rp.	54.500.000
Sub Total	Rp.	3.817.159.419
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.817.159.419

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.